

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan yang mana RKPDesa merupakan penjabaran RPJMDesa untuk 6 tahun. Pemerintah Desa menghimpun usulan masyarakat melalui musyawarah, dan menyesuaikannya dengan pagu indikatif serta prioritas anggaran. RKPDesa telah memuat RAB berikut dengan rancangan gambar untuk kegiatan pembangunan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (Raperdes APBDesa) disusun oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk kemudian dikonsultasikan dengan masyarakat. Setelah Raperdes APBDesa disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat, Raperdes APBDesa dibahas dengan BPD dan disepakati kemudian oleh Sekretaris Desa dibawa ke Camat untuk dievaluasi hingga akhirnya Raperdes APBDesa dapat diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam penyusunan APBDesa, diantaranya adanya pedoman penyusunan APBDesa, adanya pendampingan oleh pemerintah daerah, dan adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam proses penyusunan APBDesa, diantaranya peraturan terkait yang terlambat terbit dan terus mengalami perubahan, swadaya dana tidak muncul, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai APBDesa, perangkat desa yang dinilai belum siap mengimplementasikan UU Desa, serta pendapatan perangkat desa yang tidak sepadan dengan beban pekerjaan.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang peneliti ajukan kepada beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Daerah, untuk melakukan sosialisasi sesegera mungkin apabila terbit aturan baru khususnya terkait dengan proses

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Lalu diharapkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelatihan bagi perangkat desa dan tidak terpusat hanya pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa saja. Pelatihan tidak hanya dibutuhkan untuk sebatas pelatihan terkait dengan regulasi baru, serta pengaplikasian software baru, penting juga dilakukan pelatihan diluar teknis seperti pelatihan penggunaan komputer dan pelatihan softskill. Penting juga dipertimbangkan untuk melakukan penataan ulang terhadap perangkat desa yang sudah tidak mampu untuk bekerja secara efisien dan efektif. Pendampingan desa juga perlu ditambah, khususnya pendamping yang kompeten dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali penghasilan yang sepadan dengan beban kerja perangkat desa.

2. Bagi pihak Pemerintah Desa, dituntut peran aktif bagi tiap perangkat dalam melakukan tugas sesuai dengan peranan masing-masing. Pemerintah Desa juga perlu untuk berperan aktif dalam hal *upgrading* diri, misalnya dengan mengajukan untuk melakukan pelatihan. Penting bagi Pemerintah Desa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya tahap perencanaan dan peruntukkan penggunaan dana transfer yang masuk desa, diharapkan dengan kegiatan edukasi ini, masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada satu desa yang merupakan desa dengan karakteristik desa agraris yang mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani. Penelitian ini belum dapat menggambarkan kondisi umum yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman klasifikasi dan karakteristik. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan di berbagai desa dengan klasifikasi dan karakteristik yang berbeda sehingga dapat menggambarkan kondisi desa di Indonesia secara umum.